

Antara Loncat Indah dan Luka Parah: Gerakan Awal Pembelaan Buruh Migran Perempuan¹

Between High Jump and Severe Injuries: A Lesson from the Early Solidaritas Perempuan Movement for Women Migrant Workers

Tati Krisnawaty

Sekolah Sawah Organik Kaliaget, Karawang, Indonesia

tati.krisnawaty@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Juni 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

The situation of female migrant workers from Indonesia is closely linked to the conditions in their home villages. The green revolution initially established Indonesia as a nation capable of ensuring food security for its population, but this status lasted only five years. Subsequently, the agricultural land could no longer sustain the farmers' livelihoods. For women in rural areas, finding employment overseas has become a necessary step to take. There are almost no alternatives. Sadly, the nation perceives migrant workers merely as sources of foreign currency, and their susceptibility to the challenges of working abroad is not met with an adequate protective framework. Consequently, many fall victim to extortion and violence, resulting in serious injuries. Solidaritas Perempuan is the pioneering organization focused on advocating for female migrant workers through a feminist and human rights lens, specifically by challenging the patriarchal gender system and holding the state accountable for ensuring the human rights of its citizens. This article employs a feminist autoethnographic approach to trace these dynamics through lived experience and activist engagement. By situating personal reflections alongside structural analysis, the study reveals how women's intimate lives in rural communities are reshaped by state policies, patriarchal systems, and the global labor market.

Keywords: migrant workers, green revolution, livelihood of farmers, Solidaritas Perempuan

Abstrak

Fenomena buruh Migran Perempuan Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari situasi desa tempat asal buruh migran. Revolusi hijau memang sempat menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu menyediakan pangan bagi warganya (swasembada pangan), tetapi jangka waktu kemampuan itu hanya 5 tahun saja. Selebihnya, tanah pertanian tak mampu lagi menjadi sandaran hidup petani. Mencari kerja ke luar negeri bagi perempuan pedesaan adalah lompatan yang harus dilakukan. Hampir tidak ada pilihan lain. Negara memandang buruh migran sebagai aset devisa semata, kerentanan mereka menghadapi dunia kerja di luar negeri tidak diantisipasi dengan sistem perlindungan yang memadai. Akibatnya, banyak yang menjadi sasaran pemerasan dan kekerasan. Solidaritas Perempuan adalah organisasi pertama yang merintis upaya pembelaan terhadap para pekerja migran perempuan menggunakan pendekatan feminis dan HAM, yaitu membongkar sistem relasi gender yang patriarkis dan menuntut tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia warganya. Tulisan ini menggambarkan episode awal gerakan pembelaan buruh migran yang dirintis oleh Solidaritas Perempuan. Artikel ini menggunakan pendekatan autoetnografi feminis untuk melacak dinamika ini melalui pengalaman hidup dan keterlibatan aktivis. Dengan menempatkan refleksi pribadi di samping analisis struktural, studi ini mengungkapkan bagaimana kehidupan intim perempuan di masyarakat pedesaan dibentuk ulang oleh kebijakan negara, sistem patriarki, dan pasar tenaga kerja global.

Kata kunci: pekerja buruh migran, revolusi hijau, swasembada pangan, Solidaritas Perempuan

Pendahuluan

Fenomena buruh migran perempuan Indonesia merupakan salah satu wajah paling nyata dari kerusakan pembangunan Orde Baru. Di satu sisi, negara mengklaim keberhasilan Revolusi Hijau dan swasembada pangan sebagai pencapaian besar; di sisi lain, desa-desa mengalami kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong perempuan muda meninggalkan tanah kelahirannya. Di tengah kondisi inilah, migrasi menjadi sebuah "loncatan" yang hampir tak terelakkan

bagi perempuan pedesaan, meskipun lompatan itu kerap berujung pada luka parah: eksploitasi, kekerasan, dan keterasingan di negeri orang.

Tulisan ini berangkat dari pengalaman pribadi saya sebagai anak desa Karawang yang menyaksikan hilangnya kerja-kerja perempuan di sektor pertanian, hingga kemudian terlibat langsung dalam advokasi bersama Solidaritas Perempuan di awal 1990-an. Dengan menggunakan metode autoetnografi feminis, pengalaman personal tersebut diposisikan sebagai

pintu masuk untuk memahami struktur kuasa yang lebih luas—bagaimana negara, kapitalisme agraria, dan pasar tenaga kerja global membentuk kerentanan buruh migran perempuan. Prinsip *the personal is political* menegaskan bahwa cerita individu bukan sekadar kisah privat, melainkan bagian dari dinamika politik yang memerlukan pembacaan kritis dan kolektif.

Lebih jauh, artikel ini menelusuri fase-fase awal gerakan pembelaan buruh migran perempuan yang digagas Solidaritas Perempuan. Organisasi ini lahir dari kesadaran bahwa negara memandang buruh migran sebatas penghasil devisa, bukan sebagai warga negara yang harus dilindungi. Dengan perspektif feminisme dan hak asasi manusia, Solidaritas Perempuan berupaya membongkar relasi kuasa patriarki yang menindas perempuan sekaligus menuntut tanggung jawab negara.

Struktur artikel ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Pertama, penulis menguraikan latar belakang sosial-ekonomi desa dan dampak Revolusi Hijau terhadap perempuan. Kedua, artikel ini membahas pengalaman personal dan pertemuan dengan buruh migran perempuan sebagai titik refleksi. Ketiga, tulisan ini menyoroti lahirnya Solidaritas Perempuan serta strategi awal gerakan advokasi buruh migran. Keempat, artikel merefleksikan pembelajaran dari advokasi tersebut dalam kerangka feminisme kritis dan hak asasi manusia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyumbang pada dokumentasi sejarah gerakan perempuan, tetapi juga pada analisis teoretis mengenai bagaimana pengalaman perempuan pedesaan terkoneksi dengan perjuangan global untuk keadilan sosial.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan perspektif feminisme kritis untuk membaca pengalaman buruh migran perempuan Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan Orde Baru. Feminisme kritis menekankan keterhubungan antara pengalaman personal dan struktur politik-ekonomi yang lebih luas. Prinsip *the personal is political* menegaskan bahwa pengalaman individual perempuan tidak bisa dipisahkan dari konteks politik negara dan sistem ekonomi global.

Fenomena buruh migran perempuan Indonesia dapat dibaca melalui lensa teori Selatan Global, yang menyoroti posisi negara-negara pascakolonial dan masyarakatnya dalam tatanan dunia yang masih

timpang. Teori ini menekankan bahwa meskipun kolonialisme formal telah berakhir, relasi kuasa global tetap mereproduksi ketidaksetaraan, terutama melalui mekanisme ekonomi, migrasi tenaga kerja, dan politik internasional (Connell 2007; Santos 2014).

Dalam konteks Indonesia, migrasi perempuan pedesaan ke luar negeri bukan sekadar persoalan keinginan individu untuk bekerja di luar negeri, melainkan bagian dari pola eksploitatif tenaga kerja murah dari Selatan Global untuk menopang ekonomi negara-negara di Utara maupun Asia yang lebih maju. Migrasi ini menunjukkan bagaimana perempuan diposisikan dalam rantai kerja global sebagai tenaga kerja domestik dan perawatan yang tak bernilai, sesuai dengan logika *coloniality of labor*. Lebih jauh, epistemologi Selatan Global seperti Boaventura de Sousa Santos (2014) menekankan pentingnya “epistemologies of the South,” yaitu cara memahami dunia dari perspektif korban kolonialisme, kapitalisme, dan patriarki. Dengan menggunakan autoetnografi feminis, artikel ini berusaha menghadirkan suara perempuan yang terpinggirkan dari narasi pembangunan nasional maupun global.

Dengan demikian, teori Selatan Global memperlihatkan bahwa pengalaman buruh migran perempuan Indonesia merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas: bagaimana negara-negara Selatan dipaksa mengirimkan warganya sebagai buruh migran, sementara negara tetap lalai menyediakan perlindungan. Solidaritas Perempuan kemudian hadir sebagai bentuk perlawanan yang menghubungkan pengalaman lokal dengan advokasi transnasional—sebuah praktik khas feminisme Selatan Global yang menggabungkan perjuangan di akar rumput dengan solidaritas lintas batas.

Metodologi yang digunakan adalah autoetnografi feminis, yaitu metode yang menekankan refleksi personal untuk menyingkap struktur sosial yang menindas. Saya menggunakan beberapa literatur autoetnografi untuk tulisan ini antara lain dari Yoko Arisaka. Dalam artikelnya “*Becoming a Feminist: A Reflection on Life in Three Places*” (2024), Arisaka menggunakan autoetnografi reflektif untuk menelusuri perjalanan hidupnya di tiga konteks berbeda: Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Arisaka menekankan bahwa autoetnografi bukan sekadar catatan pribadi, melainkan metode filosofis dan feminis untuk memahami bagaimana pengalaman individual dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan politik yang berbeda. Saya juga menggunakan pendekatan Robin R. Griffin (2012) yang mengembangkan metode

autoetnografi feminis kulit hitam sebagai bentuk klaim suara, perlawanan terhadap pembungkaman, sekaligus produksi pengetahuan dari pengalaman hidup perempuan. Ia menegaskan bahwa emosi, kekecewaan, termasuk kemarahan adalah sumber epistemik yang sah dan dapat menjadi strategi resistensi. Dengan demikian, autoetnografi bukan sekadar narasi personal, melainkan praktik feminis yang menghubungkan pengalaman individu dengan struktur kuasa patriarki, rasisme, dan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Seperti ditegaskan Griffin, autoetnografi feminis memungkinkan *"voice, resistance, and survival through storytelling"* (2012, hlm. 139) yaitu menjadikan pengalaman perempuan sebagai bentuk perlawanan. Autoetnografi feminis memungkinkan saya mengaitkan pengalaman hidup saya di desa Karawang, keterlibatan dalam Solidaritas Perempuan, serta kerja advokasi buruh migran dengan kerangka analisis feminis dan HAM.

Adapun sumber data dalam artikel ini meliputi: 1) Refleksi personal dan pengalaman hidup penulis dibesarkan di Karawang, Jawa Barat; 2) Dokumentasi dan arsip gerakan Solidaritas Perempuan (1990–2000); dan 3) Kajian pustaka terkait feminisme, Revolusi Hijau, dan kebijakan negara tentang buruh migran. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghadirkan pengalaman personal, tetapi juga menghubungkan pengalaman tersebut dengan struktur kuasa patriarki dan kapitalisme global.

Jumpalitan

Jumpalitan adalah kata yang menurut saya paling tepat untuk menggambarkan kehidupan orang-orang di desa saya, sebuah kampung yang tidak begitu jauh dari ibukota negara, Jakarta. Sekitar 70 km saja. Namanya Pasir Awi, di Kabupaten Karawang yang pernah dijuluki sebagai lumbung padi Jawa Barat. Menurut saya, kata *"gemah ripah loh jinawi"* hanya ada di buku-buku dan di dongeng saja. Tidak dalam realitas. Saya mulai memperhatikan desa saya dengan mata dan hati ketika memutuskan untuk lanjut sekolah, kuliah agak jauh di luar kota. Nenek saya yang buta huruf dan juga buta secara fisik (karena sakit mata yang berkepanjangan dan mungkin juga karena proses pengobatan yang keliru) menanyakan, tepatnya menggugat, mengapa saya sekolah terus. Pertanyaan klasik dari orang-orang terkungkung oleh budaya patriarki: "buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi; mengapa tidak kawin saja." Di balik pertanyaan yang membuat jengkel itu, sebenarnya terselip niat baik dia; nenek menyadari bahwa keluarga saya tidak punya

uang untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, di luar kota pula; dia tidak ingin saya jumpalitan sekolah sambil bekerja. Ibu tersenyum saja, mungkin karena ia tahu anak sulungnya ini sangat keras kepala. Sementara ayah diam saja, seperti tidak peduli.

Umur saya waktu itu 20 tahun. Kawan-kawan perempuan di desa umumnya menikah setelah lulus SD atau SMP, usia antara 13–16 tahun; dengan pesta yang meriah, kata mereka karena pengantinnya perawan. Saya melihatnya sebagai fenomena jumpalitan daripada kemeriahan. Rata-rata keluarga yang mengawinkan anaknya pontang-panting berhutang ke sana kemari untuk biaya pesta; ada yang menggadaikan sawahnya, keluarga dekat mereka ikut repot harus menyumbang, lalu-lintas tersendat karena sebagian jalanan dipakai untuk panggung hiburan, dan orang berdagang tumpah ruah di pinggir jalan, anak-anak kecil ribut merengek-rengok minta dibelikan mainan plastik. Dalam pengamatan saya, hiruk-pikuk pesta perkawinan itu tidak ada hubungannya dengan penguatan fondasi perkawinan mereka yang menikah. Saya menyaksikan tidak sedikit perkawinan kawan-kawan masa kecil bubar dalam waktu singkat; ada yang cepat kawin lagi, ada juga yang bubar lagi, lalu kawin lagi, di samping mereka yang terus menjanda. Rata-rata yang menjanda, berusaha mencari nafkah sendiri, buka warung kecil, atau menjadi buruh pabrik di luar kota, ada juga yang menjadi pekerja seks komersial secara diam-diam. Hidup sangat rumit.

Ketika saya balik ke desa setelah menyelesaikan studi di fakultas psikologi tahun 1986, Ibu memeluk saya penuh kelegaan, Nenek matanya basah dan kembali ia ingatkan saya untuk segera menikah, kali ini dengan tambahan kalimat "jangan pergi jauh-jauh." Ternyata, kalimat terakhir itu berkaitan dengan cerita dia tentang beberapa kawan di desa yang berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja. Cerita yang saya terima sangat tidak lengkap. Kepala saya segera dipenuhi banyak pertanyaan: bagaimana cara mereka bekerja di luar negeri sementara pergi ke kota kabupaten saja—yang jaraknya tak sampai 10 km dari desa—hampir tidak pernah mereka lakukan; di kota mana mereka bekerja, Arab Saudi begitu luas dan jauh; apa saja pekerjaannya, amankah mereka, kalau ada masalah siapa yang membantu mereka? Sebagai teman sepermainan, saya merindukan mereka, saya merasa ciut, pelajaran di kampus, dan pergaulan saya sejauh ini tidak memberi referensi untuk bisa memahami jalan hidup teman-teman masa kecil di desa yang sungguh-sungguh jumpalitan. Dari kawin muda, menjadi ibu di usia yang

sangat belia, cerai, kawin lagi, cerai lagi, kerja serabutan, lalu terbang jauh dan menjadi buruh migran.

Dalam pasar tenaga kerja internasional, Indonesia bisa dikatakan sebagai pendatang baru yang relatif terlambat dibanding Filipina dan India. Era akhir 1970-an hingga awal 1980-an adalah masa awal Indonesia masuk pasar tenaga kerja internasional terutama untuk sektor pekerja rumah tangga untuk tujuan

Saudi Arabia dan Malaysia. Indonesia menggunakan strategi keunggulan komparatif untuk merebut pasar tenaga kerja internasional. Strategi itu mengedepankan promosi tenaga kerja Indonesia yang penurut, tidak terorganisir, dan mau dibayar murah. Strategi ini jelas melanggengkan posisi subordinat perempuan. Selain itu, Pemerintah juga menggunakan kesamaan agama (sesama muslim) untuk menggeser Filipina dan India di negara tujuan yang mayoritas penduduknya muslim.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Buruh Migran Indonesia dan Komposisi Negara Tujuan Buruh Migran Indonesia Tahun 1974—1999

Negara Tujuan	1974—79	1979—84	1984—89	1989—95	1995—99*
1. Middle East					
Saudi Arabia	3,817	55,976	223,573	268,858	267,191
Other Middle East Countries	1,235	5,349	3,428	5,145	16,071
2. South East Asia & East Malaysia & Brunei					
Singapore & Hongkong	536	11,441	38,705	130,735	392,512
3. Fast East Asia					
Korea, Taiwan, & Jepang	451	920	573	6,153	45,259
4. Other Countries	7,274	15,956	13,711	17,010	13,100
TOTAL	17,042	96,410	292,262	456,927	814,352

Sumber: Diolah dari Hugo, 1995: 279 dari statistik yang tidak dipublikasikan pada Departemen Tenaga Kerja RI

*data sampai Maret 1997

Kerusakan yang Tersembunyi

Perlahan tetapi pasti, jumlah perempuan muda yang meninggalkan desa untuk bekerja ke Saudi Arabia terus meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an.¹ Apakah ini tanda kemajuan atau sebaliknya? Saya meragukan kemajuan. Bagi saya saat itu, desa bukan lagi tempat seperti yang dilukiskan oleh syair lagu ciptaan L. Manik: “Desaku yang Kucinta”. Handai-taulan tak lagi di desa. Bukan hanya itu, banyak hal yang hilang dari desa, banyak yang teronggok dan akhirnya rusak, terbuang sia-sia. Saya tidak melihat lagi pedati berlalu lalang di jalan desa membawa hasil bumi ke pasar di kota; kandang-kandang sapi dan kerbau kosong melompong; tiada lagi suara lesung yang biasa bertalu-talu; ani-ani untuk memotong padi tergantung di dapur rumah-rumah penduduk penuh debu dan berkarat karena bertahun-tahun tidak dipakai. Lebih sedih lagi, lumbung-lumbung padi milik rakyat mulai sulit ditemui di desa. Kalaupun ada, terlihat kusam, tidak terpakai. Sementara itu, koran-koran dan televisi mewartakan berbagai peristiwa panen raya, termasuk di Karawang. Hasil panen diberitakan melimpah ruah. Di mana hasil panen itu, mengapa kawan sepermainan, yang hanya

menamatkan SD atau *drop out* dari SMP harus mengadu nasib mencari nafkah ke luar negeri?

Peristiwa Presiden Soeharto didaulat untuk berpidato di depan konferensi ke-23 FAO (*Food and Agriculture Organization*), di Roma, Italia pada tanggal 14 November 1985 merupakan puncak pengakuan internasional terhadap kemajuan yang dicapai Indonesia dalam swasembada pangan, khususnya beras. Pada 21 Juli 1986, Soeharto menerima medali emas FAO di Bina Graha Jakarta yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Edouard Saouma. Bagi saya, sebagai anak desa yang tahun itu nyaris *drop out* dari kampus karena tak mampu membayar uang kuliah, peristiwa itu seperti karpet mewah yang menutupi kerusakan sumber ekonomi di desa. Begitu kontrasnya. Lagu Leo Kristi yang berjudul “Salam dari Desa” (1985) mewakili kegundahanku, terutama di bait “tapi bukan kami punya.”

“kalau ke kota esok pagi... sampaikan salam rinduku, katakan padanya padi-padi telah kembang. Ani-ani selalu padang, roda giling berputar-putar, siang malam, tapi bukan kami punya...”

Revolusi Hijau atau modernisasi pertanian adalah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Orde Baru untuk melipatgandakan hasil pertanian (Novitri 2021)². Karawang merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai jantung utama penerapan revolusi hijau. Modernisasi pertanian ini dilakukan dengan proses intensifikasi yang juga dikenal dengan nama “Panca Usaha Tani”, meliputi: 1) Penggunaan bibit unggul³; 2) Penggunaan pupuk kimia; 3) Pembasmian hama dengan menggunakan insektisida (pembasmi hama), rodentisida (pembasmi tikus), fungisida (pembasmi jamur), dan herbisida (pembasmi gulma atau tanaman pengganggu); 4) Irigasi pertanian, yaitu usaha mendatangkan air dengan membuat saluran-saluran ke sawah-sawah atau ladang-ladang secara teratur sehingga tidak mengandalkan musim penghujan; dan 5) Pengolahan lahan pertanian menggunakan teknologi modern seperti dengan menggunakan traktor. Hal-hal positif tentang panca usaha tani mudah ditemui di berbagai literatur atau liputan media; di sini saya ingin berbagi beberapa hal yang tersembunyi dari penerapan revolusi hijau di desaku.

Bibit Unggul Padi dan Rumah Tahanan

Di era penerapan Revolusi Hijau tahun 1970-an—1980-an, petani diharuskan menanam bibit padi unggul yang disiapkan oleh pemerintah (Swastika et al. 2022)⁴ dan harus meninggalkan semua bibit padi yang selama ini petani kembangkan sendiri dari lahan pertaniannya. Seorang paman bersetia dengan benih padinya sendiri; dia tidak mau menanam benih unggul. Entah dari mana aparat berbaju loreng mengetahui hal ini; paman dibawa ke kecamatan, diinterogasi, dan masuk “rumah tahanan” karena dianggap melanggar aturan, menghambat pembangunan, atau antek PKI. Tuduhan antek PKI itu dirasakan sangat berat oleh keluarga, terutama rumor yang menyebar tidak jelas ujung pangkalnya dan paman terus-menerus dipanggil aparat. Keluarga paman akhirnya menyerah, mau menggunakan bibit unggul, dan dia meminta agar semua kerabatnya tidak lagi membicarakan hal ini. Peristiwa pembangkangan dan penahanan paman harus dikubur rapat-rapat, tidak boleh dibahas. Saya dihardik ketika mencari tahu tentang peristiwa ini. Nenek saya sudah tidak lagi ke sawah sejak ia mengalami kebutaan. Dia merasa kesal tidak bisa melabrak petugas keamanan yang memenjarakan paman. Dia sempat protes: “Penglihatanku tertutup, kini mulutku juga harus kututup”. Dia pun merasa terkucil. Tak seorang pun mau membicarakan kasus penahanan paman petani.

Kerbau-Sapi Tersingkir—Burung-burung Terbunuh

Selain bibit padi milik sendiri yang harus ditinggalkan, demikian juga sapi dan kerbau tidak ada lagi di desa; padahal selama ini telah membantu—keluarga saya dan para petani di desa turun-temurun—mengolah lahan sebelum musim tanam. Traktor telah menggantikan peran sapi dan kerbau. Sebelum ada Revolusi Hijau, kita biasa mendengar suara lenguhan sapi, suara jalannya yang pelan menuju persawahan, atau ketika mereka membawa gerobak ke kota. Masih ingat novel Max Havelaar (Multatuli 1860)? Meski tak seheroik peristiwa penyelamatan Saijah dari terkaman harimau oleh kerbaunya dalam novel tersebut, saya juga sering melihat hubungan yang begitu baik antara petani dengan sapi serta kerbau mereka. Mereka bersahabat dan saling menguntungkan. Petani membawakan rumput-rumput segar buat makanan mereka. Binatang itu memberi kotoran, bahan pupuk terbaik untuk kesuburan tanah dan air kencing untuk diolah menjadi ramuan penghalau hama. Di tahun 1980-an itu, saya tidak melihat lagi ada kandang kerbau dan sapi di desaku. Petani tidak membuat pupuk sendiri, mereka membeli pupuk buatan pabrik; yang sangat terkenal pupuk dari PT Kujang, lengkap dengan logo belati khas dari Jawa Barat.

Di tahun 1980-an, racun-racun serangga (pestisida) buatan pabrik mudah didapat di mana-mana, juga disalurkan oleh Departemen Pertanian melalui PPL (petugas pertanian lapangan), petani semangat menyemprotkan cairan racun itu di sawahnya. PPL terus-menerus mengingatkan para petani bahwa bibit unggul, pupuk urea, dan pestisida adalah tiga serangkai yang tak terpisahkan. Satu kesatuan. Bibit unggul membutuhkan masukan pupuk yang sudah disiapkan, yaitu urea dan TSP; juga membutuhkan perlindungan dari hama, agar tumbuh subur, tidak ada pengganggu. Saya ingat di tahun 1970-an, pesawat terbang meraung-raung terbang rendah di atas areal persawahan, menyemprotkan pestisida dari udara secara masif. Ibu melarang saya ke luar rumah, bahaya dia bilang. Bujang-bujang (pekerja sawah keluarga kami) bercerita bahwa mereka menemukan begitu banyak burung yang terkapar dan mati setelah pesawat itu menyemprotkan pestisida.

Lesung dan Ani-ani Tinggal Kenangan

Dulu waktu kecil, saya menyaksikan nenek saya sangat piawai memainkan lesung; alat penumbuk padi

dari kayu. Lesung itu tidak hanya digunakan untuk menguliti padi, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan alat musik. Di subuh yang sejuk, nenek memainkan alu pada lesung dengan irama yang khas. Nada-nada itu lembut mengudara, nada itu memberi pengumuman bahwa hari itu keluarga nenek akan menanam benih padi (*tandur*). Ibu-ibu tetangga yang mendengar pesan itu akan berdatangan ke sawah nenek. Menanam padi adalah kegiatan bersama dengan tetangga yang penuh dengan sukacita. Biasanya mereka bergantigantian; hari ini untuk sawah ibu A, besok untuk ibu B, dan seterusnya. Demikian pula ketika akan panen, nenek akan menabuh lesung kembali, iramanya rancak, memberi tahu tetangga bahwa padi di sawah sudah siap dipotong. Ketika fajar menyingsing di ufuk Timur, suara saling sapa yang renyah dari ibu-ibu yang akan membantu panen terdengar melewati rumah.

Kalau di waktu hari libur sekolah, saya bisa ikut dengan nenek ke sawah, bergabung bersama ibu-ibu yang berkebaya warna-warni dan bertopi caping dari bambu. Mereka membawa ani-ani di tangan. Begitu cekatan tangan mereka memotong padi, satu demi satu. Di senja hari, nenek kembali bermain lesung, tetapi tidak sendirian, ia bermain lesung bersama kawan-kawan perempuannya, berbaris memanjang, sepanjang lesung yang terbuat dari satu bongkah kayu besar, sekitar 4 meter panjangnya. Dengan alu di tangan masing-masing, sekitar 20 orang petani perempuan, menabuh lesung, iramanya lebih rancak lagi, bersahutsahatan. Suara derai tawa menimpali, sementara padi-padi kuning hasil panen disusun menjadi gunungan-gunungan di halaman rumah oleh para bujang.

Sejak akhir tahun 1970-an, nenek tidak lagi main lesung, bukan karena masalah matanya, tetapi—seperti ani-ani, lesung sudah tidak lagi digunakan di desa saya. Padi yang tumbuh dari benih unggul yang diwajibkan dalam Revolusi Hijau jenisnya berbeda, tidak tinggi, tidak dipanen dengan ani ani lagi, tetapi dengan sabit atau arit. Panen bukan lagi pekerjaan petani perempuan, tetapi petani laki-laki. Padi-padi yang dipanen itu tidak dibuat gunungan di halaman rumah, tetapi langsung masuk karung, bahkan ada yang langsung dijual ketika masih di sawah; diangkut dengan mobil ke kota. Lumbung kosong, tidak berisi padi. Gabah tidak ditumbuk di lesung lagi, tetapi digiling di pabrik (*huller*) untuk menjadi beras. Lumbung dan lesung perlahan-lahan tidak lagi eksis di desa.

Perempuan pedesaan kehilangan pekerjaan di sektor pertanian. Berurbanisasi ke kota, menjadi pekerja rumah tangga atau buruh pabrik; pada umumnya

mereka mengalami diskriminasi upah karena stigma perempuan lemah, tidak berpengetahuan, tidak terampil. Kesenjangan upah yang mencolok di dalam negeri dan meningkatnya permintaan buruh migran di luar negeri mendorong arus migrasi buruh perempuan ke luar negeri besar-besaran.

Kontradiksi

Di balik sorak-sorai panen raya dan pengakuan internasional atas peningkatan produksi beras yang fenomenal itu, di penghujung dekade 1980-an, saya justru merasakan ruang hampa di desa. Diawali dengan terbangnya kawan-kawan masa kecil saya ke luar negeri menjadi buruh migran, lalu, saya menyadari bahwa elemen-elemen identitas desa yang punya kesejarahan panjang dengan kehidupan penduduk telah melepuh. Tidak ada lagi petani perempuan di sawah saat panen, tidak digunakan lagi pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola pertanian tradisional, serta lenyapnya berbagai peralatan pertanian tradisional (antara lain: alat bajak, sapi, kerbau, ani-ani, lesung, dan lumbung padi). Berganti dengan traktor, mesin *huller*, karung-karung pupuk urea, bungkusan bibit padi IR, PB.

Di tahun 1984, saya sempat cuti kuliah (karena kehabisan biaya), saya bekerja di Lombok Utara pada sebuah lembaga kemanusiaan dari Negeri Belanda (HIVOS) yang memberi bantuan kemanusiaan pada masyarakat korban gempa bumi 1979 (Wirayudha 2018)⁵. Lembaga itu membantu memulihkan kegiatan ekonomi korban gempa (nelayan, petani, laki-laki, dan perempuan); serta membangun rumah korban yang hancur dengan konsep membangun kampung tradisional mereka, lengkap dengan *berugak* (bale-bale yang digunakan oleh suku Sasak untuk berkumpul bersama keluarga, menerima tamu dan kegiatan sosial budaya lainnya). Saya belajar bagaimana lembaga ini begitu menghormati nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat yang dibantunya. Sedih sekali mengingat apa yang terjadi di desa sendiri, pemberangusan pertanian tradisional. Saya merasa ada “gempa” yang tidak terlihat, guncangan yang merobohkan lumbung padi, mematahkan ani-ani dan menggusur lapangan kerja petani perempuan. Siapa yang memberi perhatian pada soal ini? Persoalan yang tidak mudah terlihat seperti gempa di Lombok yang memporak-porandakan ratusan bangunan rumah rakyat.

Pembelajaran dari masa kerja saya di Lombok bersama HIVOS dan kegundahan personal tentang

perkembangan di desa sendiri tentang “penghancuran yang tersembunyi” telah menguatkan saya untuk terus terlibat jauh dalam gerakan perlawanan baik yang digaungkan mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat (ornop/organisasi non pemerintah). Dalam dekade delapan puluhan, mulai bermunculan gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK. Mereka berangkat bukan dari organisasi intra kampus atau ekstra kampus tetapi tumbuh dari front-front aksi mahasiswa yang mendampingi kasus-kasus sengketa tanah atau perburuan. Saya sendiri telah bergabung dengan KSBH (Kelompok Studi dan Bantuan Hukum) di Yogyakarta pada tahun 1980, kawan-kawan diskusi di KSBH berasal dari lintas disiplin, bukan hanya dari fakultas hukum, tetapi juga dari filsafat, sastra, psikologi, sosiologi, pertanian, hingga akademi musik. Bantuan hukum struktural yang dikembangkan dan diterapkan oleh KSBH adalah bagian dari upaya membongkar cara berfikir yang fragmentaris, terkotak-kotak, penuh bias, dan menindas. KSBH aktif memberi bantuan hukum struktural pada korban-korban penggusuran di Kedung Ombo, Karanganyar, dan sekitar Candi Borobudur dengan pendekatan penyadaran dan pengorganisasian. Di lingkaran KSBH lah saya berkenalan dengan pemikir kritis yang juga aktivis, antara lain Henny Supolo, Nursyahbani Katjasungkana, Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Mulyana W. Kusumah, dan Fauzi Abdullah. Saya juga bertemu dengan Tjita Andang Sedjati aktivis perempuan yang bekerja di Bina Desa, juga Ratna Saptari dan Myra Diarsi perempuan pemikir kritis yang mendirikan organisasi Kalyanamitra. Pada era ini, juga mulai terkonsolidasi jaringan aktivis antar kota bahkan antar pulau.

Setelah lulus kuliah, saya meninggalkan Yogyakarta dan KSBH, tetapi tidak meninggalkan aktivisme. Bersama aktivis HAM dan aktivis mahasiswa dari berbagai kota, saya terlibat dalam kegiatan investigasi dan pembelaan kasus-kasus perampasan tanah, antara lain di Badega, Jawa Barat; Pulau Panggung, Lampung; dan Sugapa-Sianipar, Sumatra Utara. Tiga wilayah ini hanya secuil dari ratusan kasus perampasan sumber-sumber kekayaan dan lahan-lahan penghidupan rakyat yang terjadi pada masa itu, membentang dari Sumatra hingga Papua⁶. Dari perjumpaan dengan warga Badega, Pulau Panggung, Sugapa, dan Sianipar, saya makin memahami bahwa penyelenggaraan kekuasaan di negeri ini bersendi pada kekuatan modal besar, menggunakan cara-cara yang represif militeristis, menindas dan menundukkan, sewenang-wenang, mengeksploitasi alam gila-gilaan, memabat hutan, melecehkan pengetahuan dan kearifan lokal,

menguntungkan pemilik modal dan penguasa, tidak peduli pada hak asasi manusia. Penyelenggaraan pembangunan itu menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat banyak, terutama masyarakat desa, masyarakat adat, dan perempuan.

Korban telah banyak berjatuh. Tak terbilang. Jelas, bukan cuma desa saya yang babak belur oleh pembangunan, oleh industrialisasi pertanian. Bukan hanya teman masa kecil saya saja yang terlempar dari tanah kelahirannya. Tidak sedikit korban yang berjuang mempertahankan haknya; tetapi terlalu banyak yang dikalahkan oleh kekuasaan yang militeristis, dibungkam oleh kekerasan, atau dikelabui dengan berbagai bentuk propaganda, monopoli interpretasi, dan ideologisasi.

Saya pun semakin melihat kompleksitas posisi perempuan di akar rumput. Sebagai korban dari proses pembangunan yang kapitalistik, militeristis, dan patriarki, perempuan menanggung beban lebih berat, mengalami diskriminasi lebih banyak, dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Namun demikian, perempuan pulalah yang bertahan membela kelangsungan hidup: menjaga anak-anak dan orang lanjut usia, mencari air, menyediakan makanan, bahkan di beberapa tempat mereka menjadi pejuang yang paling gigih melawan dalam kasus-kasus perampasan tanah. Penderitaan dan beban ganda perempuan sering diabaikan. Secara umum, perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua, dianggap sebagai objek, harus tunduk, patuh dan pasrah, sering ditaklukkan baik dengan cara kekerasan, maupun dengan sanjungan yang bermata dua (seperti istilah sabar, tiang negara, surga di telapak kaki ibu). Kondisi yang menghinakan dan mengeksploitasi rakyat, terutama perempuan harus dihentikan. Relasi yang tidak adil ini harus dibongkar, harus dilawan, terutama ketidakadilan yang tersembunyi.

Solidaritas Perempuan (SP)

Untuk perlawanan itu, kami berempat (Ati Nurbaiti, Gracia Tjita Andang Sedjati, Nursyahbani Katjasungkana, dan Tati Krisnawaty) bersepakat untuk mendirikan organisasi perempuan, yang kami namakan Solidaritas Perempuan. Dalam buku putih Solidaritas Perempuan, kami menyatakan bahwa tirani yang diciptakan oleh rezim Orde Baru melahirkan Solidaritas. Kami berharap dengan organisasi ini, bisa melangkah secara kolektif, sistematis, dan terukur. Kami menggunakan perspektif feminisme dalam membaca masalah dan berpijak pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dalam mencari jalan keluar. Karena itu, kami

memberi nama panjang organisasi ini; *"Women's Solidarity for Human Rights."*

Pada tahap awal, SP merupakan kelompok kerja (*task force*) yang hadir secara spontan, sukarela, dengan struktur yang sederhana. Bentuk kegiatannya adalah pengumpulan data dan fakta di lapangan, melancarkan aksi protes di jalanan atau mendatangi institusi negara, mendampingi korban kriminalisasi kasus agraria di pengadilan. Agenda utama Kelompok Solidaritas Perempuan (KSP) adalah penguatan perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah garapannya.

Memasuki dasawarsa 1990-an adalah memasuki puncak kekuasaan rezim otoriter Orde Baru. Gagasan dan cita-cita bentuk masyarakat yang demokratis-egaliter dan emansipatorik dipandang penguasa sebagai pikiran-pikiran subversif yang paling berbahaya. Pada acara kunjungan Ketua IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*), Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Belanda, Jan Pieter Pronk ke Indonesia, bulan April 1990, sejumlah aktivis dari berbagai wilayah di Indonesia mengundangnya untuk acara dialog di kantor SKEPHI, Tebet. Para aktivis ini mengangkat berbagai isu dalam dialog tersebut, seperti kerusakan hutan, eksploitasi buruh, kebebasan berpendapat, dan perampasan tanah. Kelompok Solidaritas Perempuan (KSP) hadir dalam pertemuan itu menyampaikan tiga kasus perampasan tanah (Badega, Pulau Panggung, dan Sugapa-Sianipar) sebagai ilustrasi kekerasan negara, pembangunan yang memiskinkan rakyat, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan. Setelah Pronk pulang dari acara dialog ini, aparat mendatangi kantor SKEPHI dan menginterogasi kami seakan-akan kami adalah penjahat yang tertangkap basah.

Aparat keamanan tidak mau tahu bahwa berdialog adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Aparat keamanan tidak peduli bahwa para aktivis memiliki data yang akurat. Memang apa yang kami ungkapkan nyaris berseberangan dengan laporan Bank Dunia dalam Sidang IGGI pada waktu itu (Mangkusuwondo & Mulyono 1990)⁷. Saya sempat merasa terintimidasi oleh sikap aparat keamanan, meski mereka berseragam batik; mereka menginterogasi sampai larut malam, mencurigai, membentak, menggebrak meja, dan bertanya hal-hal yang tidak relevan. Tetapi, entah apa yang membuatku dan kawan-kawan aktivis kebal. Kami tidak surut, kami jalan terus.

Kelompok Solidaritas Perempuan (KSP) bergabung dengan Kelompok Perempuan untuk Solidaritas

Badega (KPSB), melakukan demonstrasi dan membuat petisi kepada DPR RI. Kami melakukan audiensi dengan Ketua DPR RI, agar ikut bertanggung jawab pada kasus-kasus HGU yang merampas hak rakyat atas tanah di wilayah Gunung Badega Garut, Jawa Barat. Kami juga melaporkan jalannya pengadilan 13 orang petani Badega yang dikriminalisasi karena membela hak mereka. Satu dari 13 petani itu adalah perempuan. Jumlah peserta aksi sangat sedikit, dapat dihitung dengan jari-jari tangan saja tetapi berhasil menarik perhatian media massa. Berhari-hari kami jadi berita dan ulasan berita. Mungkin karena jumlah aparat keamanan jauh lebih besar dari jumlah kami sehingga tampak begitu kontras. Mungkin juga karena aksi ini merupakan aksi kelompok perempuan yang pertama di masa Orde Baru yang sangat represif dan militeristik; aksi kelompok perempuan yang lantang mengkritik pembangunan dan meminta tanggung jawab negara pada waktu itu nyaris tidak ada. Kami membangun opini public (YLBHI 1990)⁸. Semua kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan prinsip kesukarelawan.

Feminis dan Feminisme

Sebagai organisasi perempuan, SP mengembangkan kepekaan pada relasi kuasa yang tidak adil terhadap perempuan. Di samping analisis sosial, kami melengkapi pendekatan dengan analisa feminis. Di awal tahun 1990-an, kami sempat menolak penggunaan istilah analisa gender karena kami melihat analisis gender saat itu lebih banyak digunakan (atau disalahgunakan) untuk melengkapi program pembangunan; sementara konsep pembangunan yang diimplementasikan di Indonesia berwatak patriarkhis, sentralistik, dan menyengsarakan masyarakat banyak, terutama perempuan. Kami juga merasa bahwa analisa gender waktu itu sangat teknis, melepaskan dimensi sejarah, melepaskan keterhubungan antara masa kini dan masa lalu. Kata gender pun sering membingungkan penggunaannya dan penggunaannya. Ada kalanya arti kata gender disederhanakan sebagai kata lain dari perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan memilih menggunakan metode analisa yang digunakan oleh gerakan feminisme. Kami menyadari bahwa feminisme sendiri bukan konsep yang tunggal; sangat majemuk, dinamis, berkembang dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemajemukan ini bukan masalah, justru mendekatkan SP pada pemahaman realitas penindasan perempuan dan perjuangannya yang juga beragam. Bagi SP, feminisme menyediakan seperangkat nilai-nilai yang dipetik dari pengalaman perempuan melawan ketidakadilan

Sementara itu, kata feminisme diinterpretasikan sangat berbeda oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Penuh hujatan dan tuduhan, seperti: gaya hidup ke-Barat-Baratan, tidak sesuai dengan norma Timur, menghancurkan rumah tangga, seks bebas, dan lain-lain. SP bergeming, tidak mau terganggu oleh pendapat negatif. SP jalan terus mengibarkan semangat pembebasan perempuan dari relasi yang menindas, sambil terus belajar dari berbagai macam gerakan sosial di sekitarnya; menelusuri jejak gerakan perempuan, baik yang dirintis dan digerakkan secara individual maupun gerakan yang bersifat kolektif di berbagai tempat.

Di akhir tahun 1990, SP beruntung mendapat dukungan dana yang memungkinkan lembaga ini menyewa rumah untuk kantor. Aktivis SP juga sempat magang di Gabriella, sebuah organisasi feminis yang maju dan kuat di Filipina. Selain itu, SP terus mengikuti berbagai ruang diskusi yang dibangun oleh organisasi-organisasi perempuan independen (bukan buatan Pemerintah), seperti Kalyanamitra dan Yayasan Perempuan Mardika di Jakarta, FDPY dan Annisa Swasti di Yogyakarta, serta Hapsari di Sumatra Utara. SP juga menjalin kerja sama yang intens dengan gerakan buruh, belajar bersama tokoh-tokoh gerakan buruh yang militan, seperti Ari Sunaryati, Aris Merdeka Sirait, Fauzi Abdullah, Hemasari, Yudha, Arif, Kacik, dan Krisman dari Yayasan Arek Surabaya. Belajar metode-metode pengorganisasian dan fasilitasi dari Nur Fauzi Rahman, Boy Fidro, Galuh Wandita. Belajar menajamkan analisa sosial bersama Arif Budiman, Toeti Heraty, Kamala Chandrakirana, Wiladi Budiharga, Wilarsa, dan Wardah Hafidz. Kami pun akrab bertukar pikiran dengan organisasi-organisasi lingkungan hidup (WALHI, SKEPHI) dan organisasi bantuan hukum di berbagai kota.

Solidaritas Perempuan berusaha meramu makna dan pengertian feminisme dari berbagai pengalaman gerakan sosial yang hidup di sekitarnya. SP tidak ingin terikat pada satu rumusan, apalagi dogma. Prosesnya berjalan natural, berpandai-pandai menggunakan kesempatan yang tersedia, terus belajar, mencari, menguji, dan menerapkan.

Tiga Ujung Tombak

Setelah melintasi masa kerja yang penuh dengan semangat kerelawanan, Solidaritas Perempuan kemudian mengembangkan kegiatan yang lebih mendasar, jangka panjang, tidak bersifat *ad hoc*, tetapi dirancang sistematis sebagai ujung tombak dari upaya mengembangkan gerakan perempuan. Ada tiga kegiatan ujung tombak, yaitu 1) training feminisme; 2)

penelitian tentang keberadaan organisasi perempuan di bawah rezim Orde Baru; dan 3) pembelaan pada buruh migran perempuan.

Kegiatan yang pertama dimaksudkan untuk mengkaji, memahami, dan menyebarluaskan nilai-nilai, prinsip, dan metode gerakan feminisme, sekaligus menambah kawan seperjalanan. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan modul training feminist. SP mendapat bantuan gagasan kritis dan kreatif yang sangat berharga dari sejumlah kawan di luar organisasi SP, di antaranya adalah dari Kamala Chandrakirana, Galuh Wandita, Dudi Salam, Saskia Wierenga, dan Cecilia Ng. Training feminist diberikan kepada semua aktivis SP, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan kegiatan pembelaan buruh migran, dan organisasi perempuan yang meminta (membutuhkan).

Dengan prinsip-prinsip feminisme yang kami ramu dari perjalanan sejarah gerakan perempuan di Indonesia dan di luar Indonesia, kami membangun ikatan gerakan lintas isu dan lintas kota. SP aktif dalam advokasi kebebasan pers dengan melahirkan KKP (Kelompok Perempuan untuk Kebebasan Pers) untuk mengadvokasi para aktivis dan jurnalis yang dikriminalisasi karena memprotes pembredelan majalah Detik, Editor, dan TEMPO. Aktivis SP yang memang jurnalis – Ati Nurbaiti, aktif dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam kasus Marsinah, SP menjadi bagian dari gerakan perempuan yang berposisi melihat kasus Marsinah bukan sekedar kasus perburuhan tetapi juga kasus kekerasan negara terhadap perempuan. SP membawa kasus Marsinah dalam advokasi internasional bersama tim NGO Indonesia yang menghadiri Konferensi HAM di Wina pada tahun 1993 (antara lain Nori Andriyani, Sandra Moniaga, Paskah Irianto, Hendaridi, dan Baskara Wardana). Dalam aktivitas menuju *Beijing Conference 1995*, SP menjadi konsolidator gerakan perempuan antar kota (Forum SETARA, KSGS, KKGJT). SP juga menjadi inisiator dan koordinator kegiatan Doa Antar Iman, 1997 untuk melawan politik identitas yang digerakkan pemerintah, memecah belah masyarakat.

Kegiatan yang kedua dimaksudkan untuk memahami lebih utuh bagaimana organisasi perempuan independen di bawah kekuasaan Orde Baru. Pada saat itu, kami beruntung telah membaca dengan baik buku *State Buiism* (2011) karya Julia Suryakusuma yang menyoroti organisasi-organisasi bentukan Pemerintah Orde Baru, yang membenamkan perempuan di bawah subordinasi kepentingan ideologi patriarki, stabilitas politik dan keamanan negara, serta target-target pertumbuhan ekonomi. Kami tentu berharap lewat

penelitian ini, menemukan lembaga-lembaga yang terbebaskan dari kooptasi negara; lembaga-lembaga yang memiliki autentisitas, dan kemandirian, Yanti Muchtar dan Yuniyanti Chuzaifah adalah aktivis SP yang menjalankan penelitian ini.

Sementara kegiatan yang ketiga: pembelaan buruh migran perempuan, adalah ujung tombak kegiatan yang diharapkan langsung mendekatkan SP pada perempuan akar rumput. Kegiatan ini merupakan sarana bagi SP untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat kelas bawah, khususnya perempuan pedesaan. Kegiatan ini didukung oleh tim besar dalam organisasi SP, selain Tati Krisnawaty, ada nama-nama lain, seperti Faiza Mardzoeki, Misiyah, Rusdi Tagaroa, Salma Safitri, Veronica Indriyani, dan Wahyu Susilo. Di tahun 1990-an, negara terbesar tempat buruh migran perempuan Indonesia bekerja adalah Saudi Arabia, Malaysia, dan Singapura. Dalam jumlah yang tidak terlalu besar,

buruh migran perempuan Indonesia bekerja di Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan⁹. Kami bolak-balik mengunjungi negara-negara tersebut, kecuali Saudi Arabia, untuk menjalin kerja sama dengan LSM setempat dan untuk menangani kasus. Arena advokasi buruh migran perempuan Indonesia yang digunakan oleh SP pun meluas di tingkat regional dan internasional. SP melakukan demonstrasi dan membuat intervensi dalam arena OKI¹⁰, APEC¹¹, serta sidang tahunan HAM PBB. SP menjadi anggota yang aktif dalam organisasi APWLD (*Asia Pacific for Women, Law and Development*),¹² dan CARAM Asia.¹³ SP adalah organisasi pertama di tanah air yang memulai advokasi internasional untuk buruh migran dengan memulai kampanye ratifikasi Konvensi Pekerja Migran dan menerjemahkan buku Konvensi ke bahasa Indonesia. Ini merupakan tonggak penting dalam gerakan advokasi pekerja migran.

Tabel 2.
Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Gender di Enam Negara Tahun 1994—1997

Negara Tujuan	1994-95*)	1995-96	1996-97	1997-98**)	TOTAL
	Male Female	Male Female	Male Female	Male Female	Male Female total
Midle East					
- Saudia Arabia	8,105 88,428	5,015 38,506	7,850 119,287	1,608 24,807	22,578 271,028 293,606
SouthAsia & East Asia					
- Malaysia ***)	14,584 26,854	8,088 15,821	194,343 127,413	2,623 6,435	219,912 176,523 396,435
- Singapore	6,363 9,315	7,109 15,873	5,124 26,111	1,145 7,299	19,741 58,598 78,339
- Hongkong	382 2,924	19 3,859	38 3,105	4 279	443 10,167 10,610
Far East Asia					
- Korea Selatan	2,679 615	7,913 1,228	8,342 1267	2,016 417	20,950 3,527 24,477
- Taiwan	2,729 694	3,949 868	7,513 2,022	2,459 499	16,650 4,038 20,733
Total	35,11 128,830	32,094 76,165	223,210 179,205	10,855 39,636	300,247 532,926 824,200

Sumber: Diolah Solidaritas Perempuan dari Data Seksi Evaluasi dan Laporan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia

*) data dari tanggal 01 April 1984—1997.

**) data dari tanggal 30 Juni 1997

***) Malaysia termasuk Sabah, Serawak, dan program pemutihan

Penutup

Dari proses kebersamaan buruh migran Perempuan selama sekitar 10 tahun (1990 hingga tahun 2000) dengan menggunakan pendekatan feminis, Solidaritas Perempuan memetik banyak pembelajaran. Paling tidak tentang peran besar yang telah dimainkan oleh buruh migran perempuan bagi keluarga mereka di pedesaan, tentang kebijakan negara yang abai

terhadap perlindungan bagi buruh migran, dan tentang pengorbanan buruh migran perempuan. Kami menyaksikan loncatan tinggi dan indah yang dilakukan buruh migran perempuan dari posisi sebagai perempuan pedesaan yang ditindas oleh struktur dan kultur patriarki, menjadi perempuan penyelamat keluarga mereka yang tinggal di pedesaan. Kami juga menyaksikan begitu dalamnya penderitaan yang ditanggung buruh migran perempuan karena negara

lalai dalam menciptakan sistem perlindungan hak asasi mereka. Buruh migran perempuan menjadi sasaran eksploitasi banyak aktor, antara lain majikan, agen penempatan, keluarga—terutama suami, dan pihak pihak lain seperti jasa transport umum.

Peran besar buruh migran perempuan Indonesia mungkin bisa dikuantifikasi dengan besarnya aliran devisa yang mereka ciptakan selama mereka bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia harusnya bisa menghadirkan data ini. Secara individual, peran mereka dapat ditelusuri di desa-desa tempat asal mereka. Di desa saya misalnya, tanpa anggota keluarganya yang menjadi buruh migran di luar negeri, keluarga petani sudah lama ambruk. Tanah pertanian yang rusak oleh cara bertani “modern” tidak memberikan penghasilan yang dapat menghidupi keluarga petani. Serangan hama meledak tak terkendali, sistem pengairan jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan sawah, harga padi ketika panen begitu rendah tak bisa ditawarkan. Pertanian sudah bangkrut, wajar jika anak-anak muda di desa tidak melihat pertanian sebagai ladang hidupnya. Siapa yang memberi makan keluarga petani; siapa yang membiayai perbaikan tempat tinggal mereka; siapa yang mencukupi biaya untuk berobat dan untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Peran besar yang dimainkan oleh buruh migran perempuan sungguh sangat signifikan. Mereka adalah penyelamat keluarga di pedesaan. Mereka melompat dengan sangat indah menggapai rezeki untuk sanak saudara di desa. Buruh migran perempuan telah mematahkan mitos bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah ibu rumah tangga yang hidupnya tergantung pada suami.

Jika dilihat lebih dalam, peran mereka bukan hanya untuk menopang kehidupan keluarga di desa, tetapi juga untuk negara tempat mereka bekerja. Negara-negara di Asia yang pernah menyatakan dirinya memiliki ‘keajaiban ekonomi’ pun dalam pertumbuhan ekonominya tergantung pada keberadaan buruh migran (perempuan dan laki-laki) yang berupah rendah dan yang mengisi kerja-kerja berkategori berat, berbahaya, dan kotor (Jones 2000).

Peran besar ini tidak mendapatkan pengakuan yang sejati. Memang pemerintah menyematkan gelar “pahlawan devisa” pada mereka. Apa artinya? Gelar ini tidak berkorelasi dengan upaya pemerintah membangun sistem perlindungan. Dari kalangan aktivis gerakan reformasi agraria, pernah terlempar tuduhan bahwa buruh migran perempuan membuat gerakan perlawanan petani tidak militan. Penghasilan

yang dikirim secara rutin dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dari hasil pertanian, membuat para petani tidak mengembangkan sikap kritis dalam isu pertanian. Kebenaran dari tuduhan ini memerlukan kajian. SP sendiri berpendapat bahwa buruh migran perempuan telah menyelamatkan warga desa mereka dari kemiskinan absolut.

Pembelajaran yang kedua adalah kelalaian pemerintah dalam menyiapkan perangkat perlindungan bagi buruh migran perempuan Indonesia. Kasus-kasus penipuan, pemerasan, gaji tidak dibayar, pelecehan berulang terjadi di berbagai negara tempat buruh migran bekerja. Sebagai ilustrasi, data yang dihimpun SP dalam satu tahun di masa itu (1997—1998) menunjukkan bahwa ada sekitar 24.375 buruh migran yang dideportasi, tiga orang terancam hukuman mati, 18 orang tewas di tempat tugas, 26 orang mengalami perlakuan kekerasan, 35 orang menghadapi konflik perburuhan, 1.359 orang tidak memiliki dokumen, dan lima orang hilang kontak¹⁴. Sumber masalahnya adalah buruknya pembekalan untuk menjadi buruh migran dan minimnya sistem perlindungan bagi buruh migran perempuan. Meskipun ada perubahan kebijakan dari masa ke masa, pada dasarnya Pemerintah Indonesia, khususnya Depnaker, memandang buruh migran sebagai aset penghasil devisa belaka. Buruh migran tak lebih dari mesin uang. Negara tidak beranjak dari posisinya yang patriarki, tidak melayani, tetapi menguasai. Terhadap persoalan ini, SP memulai diskusi tentang urgensi regulasi khusus tentang perlindungan pekerja migran dan mendorong pembentukan jaringan nasional Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia.

Pembelajaran yang ketiga adalah pengorbanan yang berat dari para buruh migran perempuan. Dengan perlindungan yang minimal, kerentanan buruh migran perempuan mudah menjadi ladang eksploitasi dan tindak kekerasan. Pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari buruh migran selain majikan adalah agen penempatan buruh migran dan anggota keluarga buruh migran. Lagi-lagi para pihak yang memosisikan dirinya sebagai “penguasa”, yang menentukan, yang lebih kuat, secara kultural maupun struktural, akan mengambil keuntungan dengan perhitungannya sendiri dan tidak memedulikan hak dan martabat buruh migran perempuan. Dalam kondisi ini, buruh migran akan menjadi objek yang penuh dengan jejak eksploitasi. Mereka terluka parah. Solidaritas Perempuan menangani banyak kasus, yang terberat antara lain: kasus hukuman mati yang dihadapi buruh migran di Uni Emirat Arab, perkosaan, kematian, dan

gaji tidak dibayar di beberapa negara termasuk Hong Kong, Saudi Arabia, dan Malaysia.

Dengan menempatkan pengalaman pribadi penulis—sebagai anak desa Karawang, aktivis Solidaritas Perempuan, sekaligus saksi perubahan sosial—sebagai bagian dari analisis, autoetnografi membuka ruang bagi suara perempuan yang sering tersingkir dalam narasi besar pembangunan. Memberdayakan buruh migran perempuan adalah membongkar relasi kuasa patriarki di segala lini, mewujudkan prinsip-prinsip feminis bahwa *personal is political*. Tidak ada dualisme, *double standard* dan *hypocrisy*. Bersama-sama mewujudkan keadilan yang sejati untuk semua, di dalam rumah dan di luar rumah, di dalam institusi rumah tangga dan badan negara. Sungguh memalukan negara yang lalai dan hanya mengambil untung dari kerja keras dan kerentanan buruh migran perempuan. Negara harus memperbaiki tanggung jawabnya, mengambil sudut pandang yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan.¹⁵

Daftar Pustaka

- Arisaka, Y. 2024. Becoming a Feminist: A Reflection on Life in Three Places. *Journal of World Philosophies*, 9(2).
- Connell, R. 2007. *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Polity Press.
- Griffin, R. A. 2012. I am an Angry Black Woman: Black Feminist Autoethnography, Voice, and Resistance. *Women's Studies in Communication*, 35(2), pp. 138-157.
- Jones, S. 2000. "Making Money off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia." (No Title).
- Mangkusuwondo, S. & Mulyono, S. (1990). *Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia. Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 38(2), hlm. 117–140. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199006.pdf>.
- Multatuli. 1860. *Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij*. J. de Ruyter: Amsterdam.
- Novitri, S. A. 2021. *Sejarah Revolusi Hijau dan Dampaknya hingga Saat Ini*. Greeneration Foundation: Bandung. <https://greeneration.org/publication/green-info/sejarah-revolusi-hijau-dan-dampaknya-hingga-saat-ini/>.
- Santos, B. de S. 2014. *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Routledge: New York.
- SiaR News Service. 1999. *Cepe---TRAGEDI PEKERJA WANITA INDONESIA*. The Mail Archive. <https://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg00140.html>.
- Suryakusuma, J. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Swastika, D. K. S. et al. 2022. *Tinjauan Historis Teknologi Varietas Unggul dan Program Intensifikasi dalam Peningkatan Produktivitas Padi Berkelanjutan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 39(2), hlm. 103–114. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1926>.
- Wirayudha, R. 2018. *Tujuh Gempa Lombok dalam Catatan Sejarah*. HistoriA. <https://www.historia.id/article/tujuh-gempa-lombok-dalam-catatan-sejarah-P94oz>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) et al. 1990. *LAPORAN KEADAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 1989* (1st ed.). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta. *LAPORAN-KEADAAN-HAK-ASASI-MANUSIA-DI-INDONESIA-1989-web.pdf*.

Catatan Kaki

- 1 Di tingkat nasional, data statistik Departemen Tenaga Kerja RI menunjukkan kenaikan jumlah buruh migran perempuan dan laki-laki telah mulai terlihat pada awal tahun 1980-an (periode 1979–1984) dari ribuan menjadi puluhan ribu orang dan kenaikannya begitu drastis dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu orang pada pertengahan tahun 1980-an (periode 1984–1989). Lihat data statistik pada tabel 1.
- 2 Lihat artikel Sejarah Revolusi Hijau dan Dampaknya Hingga Saat Ini dari Novitri (2021).
- 3 Bibit unggul dalam Revolusi Hijau adalah varietas tanaman hasil pemuliaan; bibit unggul dikembangkan melalui penelitian dan pemuliaan tanaman, sering kali melibatkan teknologi modern seperti bioteknologi, untuk menghasilkan varietas dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti hasil tinggi, umur pendek, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan, termasuk hama.
- 4 Ada berbagai jenis varietas unggul, hasil pemuliaan di IRRI Filipina dan di Indonesia. Keragaman ini hasil dari pemuliaan untuk tujuan tertentu, seperti ketahanan terhadap hama (VUTW), perbaikan rasa. Lihat antara lain Forum Penelitian Agro Ekonomi tentang Tinjauan Historis Teknologi Varietas Unggul dan Program Intensifikasi dalam Peningkatan Produktivitas Padi Berkelanjutan.
- 5 Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, sering mengalami gempa. Salah satu di antaranya adalah gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 1979. Menurut catatan BMKG, berkekuatan 6,1 SR. Gempa ini dilaporkan menghancurkan sekitar 295 rumah penduduk, terdapat 9 korban dengan luka berat, 98 korban luka ringan.
- 6 Untuk menyebut beberapa di antaranya yang dikenal luas: kasus bendungan Kedung Ombo, kasus Cimacan, kasus HGU tanah adat Desa Launch di Langkat Sumatra, Kasus PT Yamaker di Kalbar Jaya, kasus reklamasi Pantai Padanggalak di Kesiman Bali; Kasus Bali Nirwana Resort, Kasus Dompur NTB, kasus di Besipae NTT, kasus Enrekang dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, hingga ekspansi perkebunan kelapa sawit besar-besaran oleh PTPN II di Arso dan Prafi, Manokwari yang mengakibatkan hilangnya ribuan hektare tanah adat tanpa ganti rugi yang layak. 37 orang tewas.
- 7 Laporan Bank Dunia untuk Sidang IGGI ini diberi judul: "Foundation for Sustained Growth" menggambarkan bahwa selama masa penyesuaian 1983–1988 Indonesia telah banyak mengalami kemajuan dalam mengembangkan perekonomian yang lebih beragam (*diversified*), tidak terlalu bergantung pada migas dan bahan-bahan mentah, dan telah

banyak mengurangi kemiskinan (*incidence of poverty*). Dengan demikian maka memasuki dasawarsa 1990-an ini Indonesia telah meletakkan dasar-dasar bagi tercapainya pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustained growth*). Lihat antara lain Mangkusuwondo, & Mulyono 1990 dalam <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199006.pdf>.

- 8 Lihat YLBHI (1990). Buku ini merupakan laporan tahunan independen yang menyoroti kondisi pelanggaran HAM di akhir masa Orde Baru.
- 9 Statistik sebaran buruh migran Indonesia di tahun 1994 s.d. 1997 dapat dilihat di tabel 2.
- 10 OKI, dahulu Organisasi Konferensi Islam, kemudian menjadi Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation/OIC), saat ini beranggotakan 57 negara mayoritas berpenduduk Islam; beberapa anggota tidak mayoritas Islam penduduknya. Pada tahun 1997, Solidaritas Perempuan membuat petisi dan melakukan demonstrasi di Balai Sidang Jakarta tempat OKI melakukan sidang. Petisi disampaikan kepada mereka ini menghimbau agar OKI memberi perhatian pada isu buruh migran yang mayoritas Islam berasal dan bekerja di negara anggota OKI. SP juga menuntut agar masalah buruh migran ada dalam agenda sidang dengan menyertakan kasus Nasiroh, TKW asal Cianjur yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia.
- 11 APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik. APEC adalah forum ekonomi 21 negara di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi di kawasan tersebut. Solidaritas Perempuan mengkritik dampak liberalisasi perdagangan yang didorong oleh APEC karena potensial memperburuk kesenjangan gender dan memperluas eksploitasi terhadap perempuan, terutama yang bekerja di sektor informal dan sebagai buruh migran.
- 12 SP aktif sebagai Ketua Satuan Tugas (*focal point*) Perburuan dan Migrasi (2001–2006) yang menyelenggarakan pelatihan, penelitian, dan advokasi hak asasi manusia terhadap buruh migran perempuan.
- 13 CARAM Asia adalah jaringan regional 42 organisasi pendukung buruh migran dari delapan negara Asia, termasuk negara-negara Timur Tengah, berdiri tahun 1997. Sekretariatnya berada di Kuala Lumpur Malaysia, merupakan NGO nirlaba yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pendampingan, penelitian, dan mempromosikan hak-hak buruh migran dan hak kesehatan dengan fokus pada HIV&AIDS dan hak-hak reproduksi dan seksual.
- 14 Antara lain lihat dalam <https://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg00140.html>.
- 15 Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wahyu Susilo yang memberikan masukan berharga untuk artikel ini. Wahyu dan saya adalah aktivis Solidaritas Perempuan yang fokus pada upaya membangun gerakan pembelaan buruh migran periode 1990—2000.

